

DAFTAR PUSTAKA

- Abut, H. (2010). Perpajakan Indonesia. In *Perpajakan*.
- Aceh, P. B. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh, *3*(1), 22–31.
- Anisa, N. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama. *Perbanas Review, 1* (November), 72–86. <https://doi.org/10.1016/j.bbr.2010.05.009>
- Arifin, A. F. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama. *Perbanas Review, 1*(1), 35–52.
- Arifin, G. (2016). Perlunya Reformasi Pajak. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/artikel/perlunya-reformasi-pajak>
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 14*(1), 13–93.
- Ariyanti, F. (2017). Sri Mulyani: Kepatuhan Bayar Pajak Rendah, Pengaruhi APBN. Retrieved from <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2842086/sri-mulyani-kepatuhan-bayar-pajak-rendah-pengaruhi-apbn>
- Brotodihardjo, R. S. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Cahyonowati, N. (2011). Model Moral Dan Kepatuhan Perpajakan : *Jaai, Vol. 15* No, 161–177.
- Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Faisal, F. (2012). Peranan Etika, Pemeriksaan, Dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 9*(2), 136–153. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.09>
- Diamastuti, E. (2012). Ke (Tidak) Patuhan Wajib Pajak : *Ekonomi Dan Keuangan, 20*(80), 280–304. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i3.1803>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2017. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta*.

- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016. Retrieved from <http://www.pajak.go.id/content/laporan-kinerja-lakin-direktorat-jenderal-pajak-tahun-2016>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2008). *Pasal 3 Ayat (1) UU KUP tahun 2008*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan.
- Direktorat Jenderal Pajak, K. K. R. I. (2013). Undang-Undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya, 707.
- Ferdinand. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Fidiana. (2012). Kepatuhan pajak dalam perspektif neo ashabiyah, (80).
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cerakan Ke VIII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142. <https://doi.org/ISSN: 1979-4878>
- <http://uvers.ac.id/in/about>
- Julianto, P. A. (2017). Ditjen Pajak : Kepatuhan bayar pajak masyarakat Indonesia masih rendah.
- Junaidi. (2010). *Titik Persentase Distribusi F*. Retrieved from <http://junaidichaniago.wordpress.com>
- Kundalini, P. (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung tahun 2015*.
- Kusuma, H. (2018). Tingkat Kepatuhan Pajak Masyarakat RI Masih Rendah. Retrieved from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4214299/tingkat-kepatuhan-pajak-masyarakat-ri-masih-rendah>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Masinambow, A. (2013). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 1857–1867.
- Muljono, D. (2008). *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nugroho, R. A. (2012). Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Skripsi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Dasar 1945, 4(1), 10.
- Prajogo, J. N., & Widuri, R. (2013). Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Dan Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Wilayah Sidoarjo. *Tax & Accounting Review*, 3(2), 1–12.
- Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kewajiban Moral pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Pratiwi, I. G. A. M. A. M. A., & Setiawan, P. E. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan, Dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. *Jurnal Akuntansi*.
- Pratiwi, P. A. E., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15, 27–54.
- Priambodo, P. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017. *Universitas Negeri Yogyakarta*, (1), 128.
- Purnaditya, R. R. (2015). PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 4(2337–3806), 1–11.
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- RI, K. K. (2007). *Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007*.

- Soemitro, R. (2007). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Tiraada, T. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Emba*, 1(3), 999–1008. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Waluyo. (2008). Pembentukan Perpajakan. *Perpajakan Indonesia*.
- Waluyo. (2013). *PERPAJAKAN INDONESIA*.
- Wirenungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*. <https://doi.org/ISSN 2303-1174>
- R-Tabel*. (n.d.).
- Titik Persentase Distribusi t*. (n.d.).